

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH
PADA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT**

Aditya Achmad Fathony
aditya_fathony@yahoo.co.id

Husaeri Priatna
herieckall@gmail.com

Irma Susnti
fafihansusan@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan sampel yang diambil sebanyak 4 orang dari jumlah 20 dinas, sehingga jumlah sampel sebanyak 80 responden.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dapat digambarkan cukup baik, Efektivitas Pengendalian Keuangan dapat digambarkan cukup baik dan Kinerja Aparatur Pemerintah dapat digambarkan cukup baik. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis verifikatif bahwa secara simultan dan parsial Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 76,0% dan sisanya sebesar 24,0% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah tetapi tidak diteliti.

Kata kunci : **Anggaran Berbasis Kinerja, Efektivitas Pengendalian Keuangan dan Kinerja Aparatur Pemerintah**

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pemerintah provinsi harus mampu melaksanakan program pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan di setiap wilayah pemerintahannya, karena hal ini merupakan bentuk tercapainya kinerja pemerintahan provinsi. Moeherriono menyatakan bahwa kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Penyelenggaraan Pemerintahan di setiap Provinsi akan nampak dari hasil kerjanya. Penilaian kinerja pemerintah provinsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan wilayah-wilayah di kabupaten/kota dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu wujud kinerja aparat dari masing-masing pemerintahan provinsi yang berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.

Agar pembangunan di wilayah provinsi terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, maka perlu adanya suatu kerjasama antar individu masing-masing aparat pemerintah. Hal ini sebagaimana Prawirosentono menyatakan bahwa hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Tujuan pemerintah provinsi tentunya mencapai kinerja yang lebih baik. Namun untuk mewujudkannya perlu didukung oleh anggaran yang memadai karena tanpa anggaran setiap proses kerja itu tidak akan tercapai dengan optimal, menurut Mardiasmo menyebutkan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nurtiani yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah dan sebagai salah satu indikator kinerja aparat pemerintah daerah. Jika tujuan tercapai maka kinerja aparat pemerintah daerah pun meningkat, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka kinerja aparat pemerintah pun meningkat. Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah.

Dengan demikian, maka perlu adanya anggaran yang berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia yang dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Adapun sarannya sesuai dengan program yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk menunjang terselenggaranya pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat, maka Pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan kinerja yang baik seperti sarana dan prasarana yang memadai, kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah, transparansi keuangan agar masyarakat semakin percaya.

Pada dasarnya anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah dan sebagai salah satu indikator kinerja aparat pemerintah daerah. Jika tujuan tercapai, maka kinerja aparat pemerintah daerah pun meningkat, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka kinerja aparat pemerintah pun meningkat. Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Febrina Astria, 2016 tentang Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat) diperoleh hasil bahwa

Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur

Pemerintah Daerah. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu dinas di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yaitu dinas sosial tetapi penulis akan meneliti kembali bagaimana hasilnya jika dilakukan diseluruh dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Selain anggaran berbasis kinerja, dalam menentukan kinerja aparatur pemerintah perlu adanya pengendalian keuangan yang efektif, karena hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian internal di berbagai dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Agoes menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian berguna untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, meminimalkan biaya dan pengendalian merupakan alat yang aman untuk mendeteksi masalah serta menghindari terjadinya kesalahan yang besar. Pengendalian keuangan dilakukan agar manajer mengetahui terjadinya penyimpangan, dianalisa sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut untuk diambil tindakan perbaikan. Dengan adanya pengendalian keuangan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang selanjutnya mengarah pada efisiensi dan efektifitas operasi lembaga / organisasi.

Pengendalian keuangan juga merupakan pengendalian yang penting bagi manajer, karena laporan keuangan menyajikan ringkasan kegiatan organisasi dimasa lalu. Manajer, khususnya manajer puncak, berkepentingan terhadap informasi ringkasan itu, karena dia tidak perlu mengetahui kegiatan operasional organisasi.

Suatu pengendalian keuangan yang efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, karena hal ini akan mencapai kinerja organisasi yang diharapkan oleh semua pihak. Pengendalian keuangan akan menentukan kinerja sebagaimana menurut Jones and George dalam Ahmad dan Pratama yang mengemukakan bahwa pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

Namun pada kenyataannya Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat rata-rata belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang sesuainya antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya, serta Efektivitas Pengendalian Keuangan yang belum memenuhi standar. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kondisi Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikatornya rata-rata belum optimal / belum memenuhi. Hal ini penulis berasumsi bahwa kedua faktor ini dapat dikategorikan kinerja Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat belum optimal,

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

namun untuk membuktikannya perlu dilakukan analisis secara ilmiah dan mendalam, sehingga bagaimana pengaruhnya Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap kinerja Pemerintah.

Sebagaimana peneliti sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Lilik Putri Dwi Novrina, 2015 tentang Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Bandung) maka hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. (Sumber : <http://repository.unpas.ac.id/905/>)

Berdasarkan hal di atas penulis berasumsi bahwa kinerja pemerintah yang baik akan didukung oleh Anggaran Berbasis Kinerja serta Efektivitas Pengendalian Keuangan yang baik. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan bahwa langkah-langkah pokok dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu: penyusunan rencana strategi, penyesuaian, penyusunan kerangka acuan, perumusan atau penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.1.2 Pengertian Efektivitas Pengendalian Keuangan

Menurut Beni (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

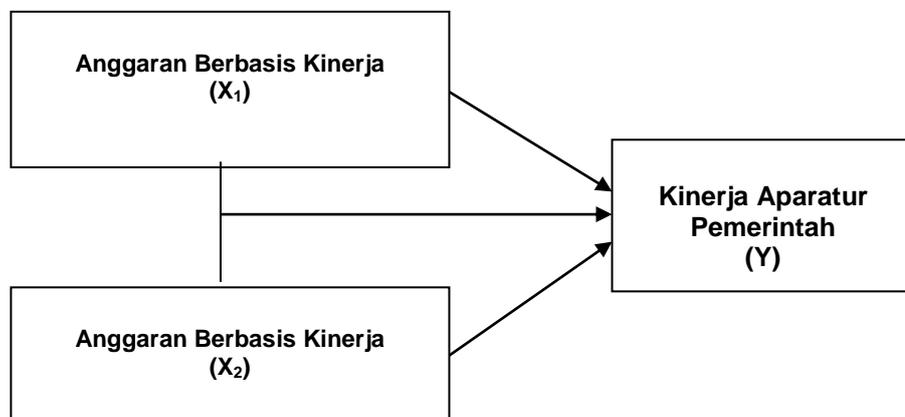
2.1.3 Pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah

Menurut Purwanto (2006:69) bahwa pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan, pengeluaran, biaya-biaya termasuk pengendalian anggaran. Adapun pengendalian keuangan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia dalam Fahmi (2011:13) bahwa pengendalian keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

Pengendalian keuangan, juga merupakan bagian dari manajemen keuangan. Sebagaimana Husnan (2008:4) menyebutkan bahwa manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan kegiatan pengendalian keuangan dalam perusahaan. Demikian pula menurut Wikipedia Bahasa Indonesia dalam Fahmi (2011:12) bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Bagan Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangkaan pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

2. Efektivitas Pengendalian Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
3. Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Pemerintah (Y)
2. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)
3. Efektivitas Pengendalian Keuangan (X_2)

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang bertugas pada dinas-dinas Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Dinas Pendapatan
2. Dinas Peremukiman dan Perumahan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
6. Dinas Peternakan
7. Dinas Perikanan dan Kelautan
8. Dinas Kehutanan
9. Dinas Perkebunan
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Bina Marga
12. Dinas Pengelolaan SDA
13. Dinas ESDM
14. Dinas KUKM
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Kesehatan

3.2.1.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah dari jumlah 20 dinas sebagai pengambil kebijakan dan pengambil keputusan, serta yang mengetahui dan terlibat langsung dengan topik yang diteliti antara lain :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang

Tabel 1
Sampel Penelitian (Responden)

No	Nama Dinas	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Jumlah
1.	Dinas Pendapatan	1	1	2	4
2.	Dinas Permukiman dan Perumahan	1	1	2	4
3.	Dinas Pendidikan	1	1	2	4
4.	Dinas Sosial	1	1	2	4
5.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	1	1	2	4
6.	Dinas Peternakan	1	1	2	4
7.	Dinas Perikanan dan Kelautan	1	1	2	4
8.	Dinas Kehutanan	1	1	2	4
9.	Dinas Perkebunan	1	1	2	4
10.	Dinas Perhubungan	1	1	2	4
11.	Dinas Bina Marga	1	1	2	4
12.	Dinas Pengelolaan SDA	1	1	2	4
13.	Dinas ESDM	1	1	2	4
14.	Dinas KUKM	1	1	2	4
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	2	4
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	2	4

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	2	4
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	2	4
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	2	4
20.	Dinas Kesehatan	1	1	2	4
	Total Sampel				80

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey (2023)

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 80 orang responden yang tersebar di dinas-dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Data di atas sesuai yang tertera pada struktur organisasi masing-masing dinas, kecuali para kasie dan staf dinas tidak termasuk dalam kategori responden.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : “Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan dengan Kinerja Aparatur Pemerintah.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 2
Koefisien Korelasi Dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- b. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) mendefinisikan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.454	3.341		1.333	.187
X1	.653	.086	.519	7.615	.000
X2	.621	.091	.464	6.809	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 4,454 + 0,653X_1 + 0,621X_2$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta dengan nilai 4,454 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka Kinerja Aparatur Pemerintah adalah sebesar 4,454.
- b_1 sebesar 0,653 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah sebesar 0,653 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- b_2 sebesar 0,621 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Efektivitas Pengendalian Keuangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah sebesar 0,621 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Pearson
Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.573**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	80	80	80
X2	Pearson Correlation	.573**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000

	N	80	80	80
	Pearson Correlation	.784**	.761**	1
Y	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Tabel 5
Hasil Analisis Korelasi Ganda
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 ^a	.760	.754	4.855475

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Kinerja Aparatur Pemerintah adalah sebesar 0,784. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah.
- Korelasi antara Efektivitas Pengendalian Keuangan dengan Kinerja Aparatur Pemerintah adalah sebesar 0,761. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Efektivitas Pengendalian Keuangan akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah.
- Korelasi ganda antara Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara simultan dengan Kinerja Aparatur Pemerintah adalah sebesar 0,872. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah.

4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,760 yang menunjukkan bahwa 76,0% kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh Anggaran Berbasis Kinerja, dan Efektivitas Pengendalian Keuangan sedangkan sisanya sebesar 24,0% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolak nya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

- a. Pada tabel 3 diatas nilai t_{hitung} untuk Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) adalah 7,615, pada t_{tabel} dengan dk 77 ($n-3 = 80-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,991. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,615 > 1,991$) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah (Y).
- b. Pada tabel 3 diatas nilai t_{hitung} untuk Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) adalah 6,809, pada t_{tabel} dengan dk 77 ($n-3 = 80-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,991. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,809 > 1,991$) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Efektivitas Pengendalian Keuangan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah (Y).

2. Uji F (Simultan)

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5745.010	2	2872.505	121.842	.000 ^b
Residual	1815.324	77	23.576		
Total	7560.334	79			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 121,842 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 77 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,120 (lihat F_{tabel} pada lampiran). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($121,842 > 3,120$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Efektivitas Pengendalian Keuangan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Aparatur Pemerintah memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah. Adapun pengaruh secara parsial Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Febrina Astria Verasvera (2016) pada BAPPEDA kota Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Demikian juga penelitian oleh Febrina Astria Verasvera (2016) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah seperti halnya menurut Nurtiani bahwa anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi pemerintah daerah dan sebagai salah satu indikator kinerja aparatur pemerintah daerah. Jika tujuan tercapai maka kinerja aparatur pemerintah daerah pun meningkat, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka kinerja aparatur pemerintah pun meningkat. Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. (Dian Nurtiani, 2010)

2. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Keuangan secara Parsial terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Efektivitas Pengendalian Keuangan dan Kinerja Aparatur Pemerintah memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Efektivitas Pengendalian Keuangan akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah. Adapun pengaruh secara parsial Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rocky Krisna Gandara (2017) pada Pemerintah Kabupaten Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Demikian juga penelitian oleh Ayu Ni'matin Nada dan Novi Khoiriawati (2022) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Wonodadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah sebagaimana Jones and George dalam Ahmad dan Pratama (2021) mengemukakan bahwa pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara Simultan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Kinerja Aparatur Pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Aparatur Pemerintah. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 76,0% memiliki pengaruh yang tinggi / kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 24,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Gaya Kepemimpinan, Anggaran Daerah, Sistem Informasi, Kompensasi, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah, sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilik Putri Dwi Novrina, 2015 tentang Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada BAPPEDA Kota Bandung) maka hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Dengan demikian, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila anggaran dikelola dengan baik serta efektif dan tepat sasaran, disertai pula pengendalian keuangan yang efektif akan menentukan kinerja aparatur Pemprov Jabar lebih baik lagi, apalagi berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh yang positif dan signifikan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hal ini bahwa secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi keduanya secara bersama-sama jika dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian Anggaran Berbasis Kinerja memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, artinya semakin baik Anggaran Berbasis Kinerja maka secara signifikan akan semakin baik Kinerja Aparatur Pemerintah demikian pula sebaliknya.
2. Efektivitas pengendalian keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian efektivitas pengendalian keuangan memberikan kontribusi positif dalam menentukan kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi

Jawa Barat, artinya semakin baik Efektivitas Pengendalian Keuangan maka secara signifikan akan semakin baik Kinerja Aparatur Pemerintah demikian pula sebaliknya.

3. Secara simultan anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, artinya apabila secara bersama-sama anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan semakin baik, maka secara signifikan akan semakin baik pula kinerja Aparatur Pemerintah, demikian juga sebaliknya. Hasil pengaruh secara simultan ini cukup kuat/tinggi yaitu sebesar 76,0%, adapun sisanya sebesar 24,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Gaya Kepemimpinan, Anggaran Daerah, Sistem Informasi, Kompensasi, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.

5.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

A. Bagi Instansi Pemerintah

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah, dengan demikian saran penulis, agar semua Aparatur Pemerintah pada masing-masing dinas mulai dari pimpinan sampai bawahan harus memperhatikan agar anggaran berbasis kinerja terus ditingkatkan, dengan memfokuskan penggunaan anggaran (input) untuk tujuan meningkatkan kinerja (*output*) yang maksimal. Karena apabila semakin baik anggaran berbasis kinerja maka akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
2. Efektivitas pengendalian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah, dengan demikian agar semua Aparatur Pemerintah pada masing-masing dinas mulai dari pimpinan sampai bawahan mampu mengendalikan keuangan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan rencana anggaran/kegiatan, karena semakin baik efektivitas pengendalian keuangan maka secara signifikan akan semakin baik juga kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
3. Anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian penulis menyarankan agar semua Aparatur Pemerintah pada masing-masing dinas mulai dari pimpinan sampai bawahan memperhatikan kedua faktor penentu kinerja Aparatur Pemerintah ini tetap baik dan optimal, karena akan menentukan secara signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat penulis kemukakan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Menambah variabel pemoderasi apakah akan memperkuat atau memperlemah variabel independen, misalnya regulasi pemerintah pusat atau gaya kepemimpinan dan lain-lain.
2. Menggunakan teknik analisis jalur, yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*).

DAFTAR PUSTAKA :

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Pengendalian Keuangan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. | Aditya Achmad Fathony, Husaeri Priatna, Irma Susanti

- Fahmi, Irham. 2011. Analisis Kritis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Husnan, Suad. 2011. Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Khusufi, Muhammad Syam. 2013 Akuntansi Manajemen (Akuntansi Manajerial). Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Nurtiani, Dian. (2010). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan Kota Cimahi). Skripsi. Bandung: Program Saijana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
- Pekei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.
- Purwanto, Iwan. 2006. Manajemen Strategi. Bandung: CV.Yrama Widya, 2006), Hal. 69
- Rudi Ahmad dan Aditya Pratama. Faktor Manajemen Profesional: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian (Suatu Kajian studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). Jurnal Manajemen Ilmu Terapan. Volume 2, Issue 5, Mei 2021. E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246. Hlm. 699 – 709.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.
- <http://repository.unpas.ac.id/905/> (Diakses hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2023, pukul 12:26 WIB)